Lima roti dan dua ikan

Oleh: Anggun Dewara

Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi engkau makan, ...
(Matius 25:37)

Yesus mengucapkan kalimat tersebut ketika sedang mengajar tentang penghakiman terakhir. Dia memilih tema lapar, karena lapar merupakan salah satu ekspresi kebutuhan manusia yang paling mendasar. Penghakiman terakhir yang Dia gambarkan, ternyata mensyaratkan kasih – yang berwujud pada empati akan kesengsaraan dan ketertindasan sesama – sebagai ukuran adil di dalam penghakimanNya. Artinya, Yesus mau mengajarkan bahwa **satu-satunya** cara mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama.

Rupanya terdapat keprihatinan serupa yang mendorong para wakil rakyat menetapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. UU tersebut mengartikan ketahanan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan bagi setiap rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata, serta terjangkau. Sayangnya kondisi ideal tersebut tidak gampang diwujudkan, karenanya dibutuhkan partisipasi banyak pihak untuk mewujudkannya.

Tulisan ini lebih bersifat mendeskripsikan fakta-fakta, yang secara luas dapat dimaknai sebagai kondisi rawan pangan. Hal rawan pangan tersebut dapat diartikan sebagai kondisi terancamnya ketersediaan pangan, dengan tiga variabel penentu, yaitu **jumlah** dan **mutu**, yang perpaduannya berujung pada **harga** bahan pangan. Dalam konteks Indonesia, pangan dapat lebih diartikan sebagai beras, karena partisipasi konsumsi beras di Indonesia mencapai 96% dari jumlah penduduk. Sehingga segala kebijakan perberasan akan berdampak pada hampir seluruh penduduk.

Jumlah beras yang cukup

Semakin banyak penduduk, semakin banyak pula pangan yang dibutuhkan. Itu sebabnya pangan dalam jumlah yang cukup menjadi ukuran utama ketahanan pangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain : faktor alam yang diluar kontrol manusia (seperti kekeringan dan banjir), menurunnya lahan pertanian secara sistematis, dan perdagangan bebas di pasar internasional.

Hampir seluruh petani Indonesia menganggap faktor alam sebagai pemberian Tuhan yang tidak bisa diubah. Konsekuensinya, praktek pertanian lebih dianggap sebagai spekulasi daripada sebuah usaha yang terencana. Padahal di banyak negara, gejala alam tersebut (El Nino, La Nina, dsb) dapat diamati, ditemukan polanya dengan akurat, untuk kemudian diinformasikan kepada petani dengan tujuan untuk membantu petani merencanakan usahanya. Untuk masalah tersebut, yang dibutuhkan petani adalah sebuah sistem informasi cuaca yang pas, akurat dan komunikatif. Supaya dapat dihindari bencana gagal panen yang sangat merugikan banyak pihak.

Rata-rata luas lahan garapan petani sekitar 0,3 ha, dan selalu semakin menurun karena berubah menjadi areal permukiman, industri, lapangan golf, dsb. Hal tersebut dapat terjadi karena kebijakan pertanahan yang tidak berpihak kepada pertanian, dibarengi dengan keputusasaan petani meneruskan usahanya. Banyak petani yang memilih menjadi TKI ke luar negeri, mengadu nasib ke kota, atau beralih bidang usaha lain, karena usaha bertani hanya akan memberikan penghasilan yang sangat rendah, apalagi jika lahannya telah ditawar *developer* dengan harga tinggi. Diperlukan perbaikan kebijakan pertanahan, yang disertai kebijakan perpajakan yang berpihak pada pertanian, untuk menghambat laju penurunan luas lahan garapan tersebut.

Setidaknya ada dua fakta mengapa perdagangan internasional mempengaruhi jumlah bahan pangan yang tersedia. Pertama, sekitar 80% perdagangan beras dunia dikuasai hanya oleh 6 negara, yaitu . Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Pakistan, Cina dan Myanmar. Kedua, Indonesia menjadi pengimpor beras terbesar di dunia, misalnya tahun 1998 Indonesia mengimpor 31% total beras yang diperdagangkan di dunia. Kedua

fakta tersebut menunjukkan betapa Indonesia sangat tergantung pada perdagangan internasional. Sehingga penurunan harga beras di pasar internasional, dipadukan dengan penurunan produksi dalam negeri, mengakibatkan impor beras – baik oleh pemerintah, pengusaha, maupun penyelundupan – tidak dapat dihindari. Hal tersebut diperparah oleh tarif perdagangan dunia yang tidak fair, karena negara-negara maju menerapkan bea masuk yang jauh lebih tinggi dari kebijakan tarif di negara berkembang.

Mutu dan gizi yang layak

Bangsa yang kuat adalah bangsa yang penduduknya sehat, karena hanya manusia yang sehat yang dapat belajar dan berkembang. Oleh sebab itu mutu, gizi, dan tingkat keamanan beras harus terjamin. Teknologi pertanian menjadi tumpuan peningkatan mutu beras, yang pada gilirannya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Pengembangan teknik bercocok tanam sangat diperlukan oleh petani, misalnya *hortikultura* (pertanian tanpa tanah) ataupun pertanian organik (tanpa bahan kimia, seperti pupuk buatan, pestisida, dsb). Penelitian tentang *diversifikasi* (penganekaragaman) pangan juga perlu didukung, baik dari segi kandungan gizi maupun kebiasaan konsumsi masyarakat. Karena diduga keseragaman konsumsi beras merupakan salah satu upaya rezim Orde Baru melanggengkan kekuasaannya. Sehingga masyarakat harus diajari lagi bagaimana mengkonsumsi jenis bahan pangan lain.

Pemerintah memiliki kebijakan nasional perdagangan beras yang berbasiskan konsep *keunggulan komparatif dan kompetitif*. Secara sederhana dapat dijelaskan, kita mengekspor beras dengan mutu dan harga tinggi, lalu mengimpor beras dengan mutu dan harga rendah. Tujuannya, selain untuk mendapatkan *surplus* perdagangan sebagai pendapatan negara, juga untuk menghindari tingginya angka inflasi. Namun kebijakan tersebut mengakibatkan masyarakat – khususnya kaum pinggiran – tidak punya pilihan untuk tidak mengkonsumsi beras dengan mutu rendah.

Kebijakan subsidi bagi masyarakat miskin, berbentuk program raskin, yang bertujuan meredam lonjakan harga beras, supaya masyarakat dapat membeli beras dengan harga Rp 1.000 /kg. Namun kebijakan tersebut memiliki konsekuensi penurunan kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat.

Harga yang terjangkau

Masalah harga pangan adalah pemicu yang sangat efektif bagi terciptanya kekacauan politik, sosial, dan ekonomi. Karena setiap kenaikan 10% harga pangan, meningkatkan 1% jumlah penduduk miskin. Rakyat yang lapar merupakan potensi munculnya kerusuhan, yang pada gilirannya menggoyahkan stabilitas bangsa dan negara. Sayangnya, seringkali masalah harga tersebut merupakan masalah kompleks yang diluar kendali pemerintah. Harga beras dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya: pasar bebas, pola distribusi, inefisiensi produksi, kebijakan politik, dsb. Oleh sebab itu keterjangkauan harga bahan pangan menjadi prasyarat utama stabilitas ketersediaan pangan.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) meramalkan pada tahun 2015 kebutuhan pangan penduduk dunia tercukupi karena pertumbuhan penduduk mencapai 1,3% sedangkan pertumbuhan produksi pangan mencapai 3,5%. Namun FAO juga memperkirakan kelaparan akan menimpa sekitar 500 juta penduduk dunia karena produksi dikuasai oleh negara-negara maju, sedangkan negara-negara miskin dan berkembang menjadi konsumennya (Kompas, 11 Juni 2002). Terlihat bahwa masalah besar bukan pada aspek produksi, melainkan distribusi yang dikuasai sebagian kecil pihak. Kondisi kesangat tergantungan tersebut tidak sehat, karena negara maju dapat dengan leluasa menentukan harga pangan di pasar internasional.

Biaya produksi yang telah mahal oleh harga benih dan pupuk, masih harus dibebani dengan naiknya harga BBM, maupun inefisiensi produksi akibat rendahnya teknologi pertanian yang digunakan, juga rendahnya tingkat pendidikan dan wawasan petani. Distribusi seringkali menimbulkan distorsi pasar yang berujung pada labilitas harga. Apalagi distribusi beras, rawan dimanipulasi karena beras tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, melainkan juga menjadi komoditas politik, dimana ada kepentingan banyak

pihak. Jalur distribusi yang panjang ini harus dipangkas, demi menghindarkan masyarakat dari harga pangan tinggi dan memperkecil kemungkinan korupsi.

Ancaman atau panggilan?

Upaya pemecahan masalah krisis pangan tersebut tidak pernah berhenti dilakukan. Di antaranya terdapat beberapa alternatif untuk mengantisipasi krisis pangan, yaitu: (1) Pemberdayaan dan peningkatan pendapatan petani padi; (2) Jaminan ketersediaan pangan bagi konsumen rawan pangan; dan (3) Pengembangan perekonomian pedesaan terkait dengan ketahanan pangan.

Pemberdayaan dan peningkatan pendapatan petani padi dapat diwujudkan antara lain dengan memberi rangsangan bagi proses produksi beras (dengan memberi subsidi bagi pupuk dan benih), mendidik petani bercocok tanam secara organik (sehingga tidak tergantung kepada pupuk buatan yang biasanya mahal), penetapan bea masuk impor beras yang tinggi (untuk melindungi harga dasar gabah petani dari dampak penurunan harga beras di pasar internasional), dsb.

Ketersediaan pangan bagi konsumen rawan pangan dapat dilaksanakan antara lain dengan menjalankan program raskin (dengan memberi subsidi bagi rakyat miskin), mendidik masyarakat mengkonsumsi bahan pangan lain (gandum, jagung, ubi, dsb), memangkas panjangnya jalur distribusi beras (untuk mencegah tingginya harga beras), dsb. Hal tersebut merupakan bagian terpenting, setidaknya karena dua alasan. Dalam jangka pendek, ia bersifat mendesak dan harus, untuk menghindari kemarahan masyarakat. Dalam jangka panjang, ia menuntut kesinambungan, sehingga perencanaannya harus komprehensif.

Pengembangan perekonomian pedesaan dapat diupayakan antara lain dengan membentuk koperasi tani, mendidik petani mengolah hasil pertanian (untuk memberi nilai tambah produk pertanian), mengupayakan teknologi tepat guna untuk mengolah hasil pertanian (demi peningkatan efisiensi produksi), menyediakan sistem informasi cuaca yang cocok pas bagi petani (sehingga petani dapat merencanakan usahanya), dsb.

Gereja dapat mengambil bagian dalam kewajiban luhur mengupayakan ketahanan pangan, dengan melaksanakan alternatif yang paling mungkin. Tentunya kerja sama antara gereja kota dengan gereja desa sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sinergi yang positif. Gerakan *diakonia* dan aksi-aksi *karitatif* dapat diarahkan dengan lebih sistematis dan efektif bagi kesejahteraan umat manusia, di sekitar gereja setidaknya.

Gereja sebagai sebuah kekuatan sosial ekonomi, memiliki potensi yang sangat besar dalam melaksanakan alternatif solusi tersebut. Menjadi tanggungjawab sosial gereja untuk memelihara yang teraniaya demi menge*jawantah*kan kasih Tuhan kepada dunia ini. Supaya di hari penghakiman gereja tahu posisinya. Apakah akan menjadi domba-domba yang berada di sebelah kanan Anak Manusia, ataukah menjadi kambing-kambing di sebelah kirinya? Itu sebuah pilihan. *Wallahualam.*

... sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraKu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.

(Matius 25:40)
